

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi atau yang sering dikenal sebagai Kingdom of Saudi Arabia (KSA) merupakan negara yang berdiri pada tahun 1932 dengan wilayah geografis paling besar di Kawasan Jazirah Arab (semenanjung di Asia Barat Daya). Melihat Sejarah di Timur Tengah, Arab Saudi merupakan tempat di mana awalnya agama Islam lahir dan berkembang, yang mana penyebarannya dan ajarannya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di kota Makkah. Negara ini selain dikenal sebagai negara Islam yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut dengan dasar hukum syariat Islam juga dikenal di dunia sebagai negara penghasil minyak (25% cadangan minyak dunia) dan gas (40% cadangan gas dunia) yang berperan penting terhadap pasar internasional (Azizah, 2023).

Arab Saudi saat ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang menjabat sebagai raja Saudi sejak bulan Januari pada tahun 2015. Pada bulan Juni 2017, Raja Salman mengangkat putranya yakni Mohammed bin Salman sebagai *Crown Prince* (Putra Mahkota) atau ahli warisnya dan saat ini hampir semua bentuk kekuasaan dikendalikan olehnya (BBC, 2023). Sebagai negara Islam pertama di muka bumi sekaligus tempat pertama kalinya agama Islam lahir dan berkembang tentu menjadikan Saudi sebagai ikon atau pusat peribadatan utama bagi umat muslim di dunia seperti kota Mekah dan Madinah. Menurut Britannica, mayoritas penduduk di Arab Saudi menganut Agama Islam dengan aliran Sunni. Sunni Islam di Saudi sendiri kerap kali dikaitkan dengan gerakan Wahabi yang mana gerakan tersebut merupakan penafsiran ketat dari mazhab Islam Hambali (Britannica, 2016).

Mengingat aliran agama Islam yang dianut oleh Arab Saudi adalah Sunni Islam, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa banyak mayoritas penduduknya yang beragama Islam aliran Sunni. United Nations (Persatuan Bangsa-Bangsa) di tahun 2019 menaksir bahwa di antara 85% hingga 90% dari sekitar 21 juta penduduk Saudi menganut Islam Sunni. Sementara itu, para Muslim yang mengikuti aliran Syiah terdapat sebanyak 10% hingga 12% dari populasi

penduduk dan ditaksir ada sebanyak 25% hingga 30% dari populasi penduduk yang ada di Provinsi Timur (Office of International Religious Freedom, 2022). Meskipun Arab Saudi sejatinya merupakan ikon utama bagi mayoritas umat muslim di dunia, hal tersebut tidak semata-mata membuat Saudi akan selalu merasa aman dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah karena Saudi dikelilingi negara-negara muslim yang entah pro-Saudi atau pro-Iran atau bahkan pro-Saudi-Iran sekaligus (sebagai pembimbing maupun pendukung mereka). Bagi Saudi, Iran sebagai negara tetangganya merupakan hal yang bisa mengancam pengaruhnya di Timur Tengah karena sejak terjadinya Revolusi Islam Iran 1979, aliran muslim Syiah menyebar ke banyak negara di sekitaran Arab Saudi yang notabenenya negara Islam Sunni (Marcus, 2017).

Melihat perbedaan aliran agama Islam Sunni dan Syiah yang terjadi di Arab Saudi dan Iran tidak hanya memberikan efek hubungan diplomatik kepada dua negara itu saja, namun juga perbedaan aliran tersebut berimbas kepada negara Arab atau kelompok Islam yang tidak mengikuti aliran Sunni. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Saudi dikelilingi banyak negara yang mungkin tidak sepaham dengannya membuat Saudi harus berhati-hati apalagi negara tersebut berdekatan dan bisa mengancam Arab Saudi. Misalnya saja seperti Yaman, negara ini mengalami banyak permasalahan dimulai dari krisis politik hingga kegagalan pemerintahan yang disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat Yaman terhadap pemimpinnya yang bersikap otoriter dan bisa dibilang juga kurang memperhatikan kebutuhan para rakyatnya serta terjadinya diskriminasi terhadap para pengikut agama Islam aliran Syiah Zaydi oleh pemerintah Yaman yang mengikuti aliran Sunni. Hal ini kemudian membuat terjadinya perang saudara di Yaman antara kelompok pemberontak Houthi atau Ansharullah (Syiah Zaydi) dengan Pemerintah Yaman (Sunni) yang berlangsung bertahun-tahun lamanya (Saja, 2021).

Kekacauan yang terjadi di Yaman sebagai negara karena adanya perbedaan aliran agama Islam dan perbedaan kepentingan kelompok yang menguasai Yaman membuat Saudi harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 2014, persetujuan antara pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Houthi mencapai awal permulaan perang saudara di Yaman ditambah lagi kelompok pemberontak tersebut berhasil mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa,

tepat di akhir tahun 2014. Setahun setelah peristiwa diambil alihnya kota Sanaa, Presiden Hadi angkat kaki dari Yaman dan mengasingkan dirinya ke Arab Saudi di awal tahun 2015. Setelah merasa aman, Hadi meminta bantuan kepada komunitas internasional untuk mengatasi kekacauan di Yaman. Arab Saudi sebagai pemimpin koalisi negara-negara Arab dalam hal ini berupaya membantu pemerintah Yaman untuk mengambil alih kekuasaan mereka secara penuh dari kelompok pemberontak Houthi (ShelterBox, 2023).

Niat Arab Saudi untuk membantu pemerintah Yaman untuk mengalahkan kelompok pemberontak Houthi secara tidak langsung juga dibarengi dengan niat negara tersebut untuk menjaga hegemoninya di kawasan Timur Tengah sebagai negara Islam penganut aliran Sunni pertama di dunia. Seiring berjalannya waktu perang saudara di Yaman ini dijadikan sebagai arena untuk melakukan perang proksi oleh Iran yang mendukung kelompok pemberontak Houthi dengan latar belakang Syiah dan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dengan latar belakang Sunni. Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman menjalankan kebijakan blokade angkatan laut untuk mencegah bantuan Iran yang ditujukan kepada Houthi. Merespon hal tersebut, Iran juga mengerahkan angkatan laut yang kemudian semakin menambah risiko adu kekuatan militer satu sama lain (Center for Preventive Action, 2023).

Seiring berjalannya waktu, intervensi Arab Saudi dan koalisinya terhadap perang saudara di Yaman terjadi beberapa perubahan seperti hadirnya gencatan senjata walaupun pihak-pihak yang bersengketa atau terlibat dalam perang saudara tersebut masih saling serang. Sejak tahun 2015, Arab Saudi terlibat dalam krisis di Yaman. Pada awalnya, Arab Saudi berupaya memberantas pemberontak Houthi dengan melakukan serangan melalui udara hingga memutus hubungan udara dan maritim. Namun demikian, setelah konflik tujuh tahun yang berkepanjangan, pemberontak Houthi berhasil menguasai sebagian besar wilayah barat laut Yaman, meliputi ibu kota Sana'a. Menurut PBB, kekerasan tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 230 ribu orang, sementara jutaan lainnya menanggung akibat kelaparan dan penyakit (Hodali, 2021). Kemudian, pada tahun 2022 PBB (United Nations) meminta utusannya yang berada di Yaman untuk mengajak semua pihak yang bertikai termasuk Arab Saudi, pemerintah Yaman, dan Houthi untuk menyepakati

gencatan senjata yang diupayakan bisa diperbarui setiap dua bulan sekali. Pada tanggal 2 April 2022, semua pihak yang bertikai akhirnya mau menyepakati gencatan senjata yang diinisiasikan oleh PBB pada perang Saudara di Yaman setelah sekian lama berseteru dengan kelompok pemberontak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah atas penelitian ini yaitu: “Mengapa Arab Saudi menyepakati gencatan senjata dengan kelompok Houthi pada perang saudara di Yaman pada tahun 2022?”

1.3 Kerangka Berpikir

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan model aktor rasional tipe I sebagai kerangka berpikir. Pada bagian ini model tersebut digunakan sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas.

1.3.1 Model I Aktor Rasional

Sebelum masuk ke penjelasan terkait Model I Aktor Rasional, Graham T. Allison (Allison, 1971) sebagai penggagas model aktor rasional dalam bukunya yang berjudul *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* terlebih dahulu menjelaskan Model I secara umum berargumen bahwa Meskipun ada perbedaan besar dalam kepentingan dan bidang yang menjadi perhatian, mayoritas pakar dan masyarakat awam berusaha memahami peristiwa-peristiwa dalam hubungan internasional sebagai tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh pemerintah nasional yang kohesif (Allison, 1971). Model I berfungsi untuk menunjukkan alasan tindakan negara atau pemerintah, mengingat tantangan strategis yang mereka hadapi. Misalnya, ketika dihadapkan pada tantangan yang ditimbulkan oleh penempatan rudal strategis Uni Soviet di Kuba, analis Model I merumuskan pertanyaan: Apa alasan di balik keputusan Uni Soviet untuk menempatkan rudal di Kuba? Selanjutnya, ia menetapkan unit analisis sebagai pilihan pemerintah. Selanjutnya ia mengarahkan perhatiannya pada konsepsi tertentu, yaitu maksud dan tujuan bangsa atau pemerintahan. Terakhir, ia menggunakan pola deduksi yang spesifik: jika suatu negara melakukan tindakan

tersebut, maka negara tersebut pasti memiliki tujuan yang sesuai (Allison, 1971, pp. 4-5).

Implikasi dari Model I adalah bahwa peristiwa-peristiwa penting merupakan akibat dari sebab-sebab yang signifikan, artinya aktivitas-aktivitas raksasa yang dilakukan oleh monolit didorong oleh motif-motif yang substansial. Namun, penting untuk diketahui bahwa perspektif ini perlu diimbangi dengan pemahaman bahwa: (1) Monolit merupakan wadah buram yang menyembunyikan beragam mekanisme dan mekanisme dalam kerangka pengambilan keputusan yang kompleks. (2) Terjadinya peristiwa-peristiwa penting merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan kecil yang banyak dan sering kali bertentangan, yang dilakukan oleh individu-individu di berbagai tingkat organisasi birokrasi, semuanya bekerja menuju serangkaian gagasan yang sebagian konsisten mengenai tujuan nasional, tujuan organisasi, dan tujuan politik. Prototipe Untuk mengatasi tantangan hubungan internasional secara efektif, kita harus memahami tujuan nasional dan faktor internal yang membentuk keputusan atau tindakan pemerintah (Allison, 1971, pp. 5-6). Asumsi dari Model I yakni “seorang” atau “individu” sebagai seorang pemain catur secara strategis memanipulasi bidak caturnya, menggunakan strategi dan taktik, dengan tujuan akhir mencapai kemenangan dalam permainan tersebut. Analisis Model I sangat cocok untuk membuat penilaian inti krisis tingkat tinggi (Allison, 1971, pp. 7-9).

Model I, menjelaskan bahwa Keputusan dibuat oleh seseorang yang mempertimbangkan berbagai pilihan sehubungan dengan tujuan tertentu. Kebijakan mengacu pada implementasi tujuan agen dalam konteks tertentu. Gagasan ini mengklasifikasikan fenomena sebagai tindakan yang dilakukan oleh aktor yang disengaja. Identifikasi ini merupakan perluasan langsung dari asumsi yang dianut secara luas bahwa tindakan manusia pada dasarnya bersifat rasional, sebuah keyakinan inti dalam sebagian besar penafsiran perilaku manusia. Namun, apa definisi tepat dari menganggap perilaku sebagai “tindakan”? Ketika mempertimbangkan aktivitas sebagai “rasional yang disengaja” atau memeriksa perilaku sebagai tindakan yang diarahkan pada tujuan, apa sebenarnya yang tercakup dalam konsep-konsep ini? Model yang tepat dari konsep tindakan ini telah dibangun di bidang ekonomi, teori keputusan, dan teori permainan. Ketelitian

model ini berasal dari gagasan bahwa tindakan mencakup lebih dari sekedar pilihan yang disengaja oleh satu individu. Rasionalitas meningkatkan gagasan tentang tujuan dengan memperkenalkan konsistensi. Konsistensi ini berkaitan dengan penyelarasan tujuan dan sasaran dengan suatu kegiatan tertentu, serta penerapan prinsip untuk memilih alternatif yang paling optimal. (Allison, 1971, pp. 28-29).

Rasionalitas adalah tindakan pengambilan pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai, dengan tetap memperhatikan batasan atau batasan tertentu. Penerapan model tindakan bertujuan ini sangat luas dan informatif. Paradigma ini memungkinkan para ahli teori keputusan dan permainan untuk mengatur masalah pilihan (Allison, 1971, p. 30). Model I Aktor Rasional sendiri memiliki beberapa komponen paradigma yang meliputi dasar analisis, konsep pengorganisasian, dan pola inferensi dominan untuk mengetahui apakah tindakan yang diambil merupakan tindakan yang rasional.

I. Unit Analisis Dasar

Tindakan pemerintah sebagai sebuah keputusan. Peristiwa dalam hubungan internasional dianggap sebagai keputusan yang dibuat oleh suatu negara atau pemerintahan pusatnya. Pemerintah memilih tindakan yang paling mengoptimalkan tujuan dan sasaran strategis mereka. "Solusi" terhadap tantangan strategis adalah konsep penting yang digunakan analisis untuk memahami dan menafsirkan apa yang perlu diklarifikasi (Allison, 1971, p. 32).

II. Konsep Pengorganisasian

A. **National Actor:** Agen dalam konteks ini mengacu pada bangsa atau pemerintah, yang dikonseptualisasikan sebagai pengambil keputusan yang logis dan terpadu. Aktor mempunyai serangkaian tujuan yang telah ditetapkan (sebanding dengan fungsi utilitas yang stabil), serangkaian pilihan yang dirasakan, dan penilaian tunggal terhadap hasil yang dihasilkan dari setiap keputusan (Allison, 1971, pp. 32-33).

B. **The Problem:** Pemilihan tindakan ditentukan oleh kesulitan strategis yang dihadapi negara tersebut. Bangsa ini terpaksa mengambil tindakan karena munculnya ancaman dan peluang di "pasar" strategis dunia (Allison, 1971, p. 33).

C. **Static Selection:** Keseluruhan tindakan pejabat pemerintah yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu merupakan “solusi” yang dipilih oleh negara. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai keputusan yang konsisten antara hasil-hasil yang berbeda, bukan sebagai serangkaian keputusan parsial dalam urutan yang berubah-ubah (Allison, 1971, p. 33).

D. **Action as Rational Choice:** Komponennya terdiri dari *Goals and Objectives, Options/Alternatives, Consequences*, dan *choice*.

a) **Goals and Objectives**

Tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) dalam model ini diartikan sebagai “preferensi” atau “hal yang paling disukai” yang juga kemudian berguna untuk mempresentasikan “nilai” atau “kegunaan” dari alternatif yang menghadirkan beragam konsekuensi. Saat seorang aktor mengambil keputusan, ia akan melakukan pengurutan terhadap seluruh konsekuensi yang muncul sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Jumlah konsekuensi yang muncul juga tidak luput dari efek samping yang beragam. Tetapi setidaknya oleh sang aktor (Allison, 1971, p. 29). Sederhananya, dalam menyusun tujuan yang strategis maka yang dikategorikan sebagai hal paling utama adalah keamanan nasional dan kepentingan nasional. (Allison, 1971, p. 33).

Kepentingan nasional sendiri menurut Donald E. Nuechterlein terbagi menjadi empat kategori agar bisa landasan kebijakan luar negeri sebuah negara. Pertama, *defence interest*: melindungi sebuah negara serta warga negara di dalamnya dari segala bentuk ancaman yang berasal dari negara lain, dan/atau ancaman eksternal kepada sistem pemerintah. Kedua, *economic interest*: memperbaiki tingkat kesejahteraan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ketiga, *world order interest*: memelihara sistem politik serta ekonomi internasional agar sebuah negara merasa harmoni/aman, dan juga warga negaranya hingga perdagangan dioperasikan secara aman dan damai di luar batas negaranya. Keempat, *ideological interest*: keberlanjutan serta perlindungan terhadap nilai-nilai yang diikuti oleh khalayak sebuah

negara dan dipercayai sebagai nilai yang secara universal bersifat baik (Nuechterlein, 1976, p. 248).

b) *Alternatives*

Aktor rasional ketika menghadapi situasi tertentu wajib memilih satu alternatif yang ada dari banyaknya alternatif lain yang muncul (minimal terdapat dua alternatif). Alternatif-alternatif yang muncul ini sering disimbolkan sebagai pohon keputusan dalam teori keputusan. Meski tindakan-tindakan alternatif bisa jadi mencakup lebih dari sekedar tindakan yang bersifat sederhana, tetapi perlu diingat bahwa perincian tindakan wajib bersifat cukup akurat atau cermat agar bisa dibedakan dengan alternatif-alternatif lainnya (Allison, 1971, pp. 29-30).

c) *Consequences*

Beragam konsekuensi sifatnya melekat terhadap setiap alternatif yang ada atau hasil (*results*) dari pilihan yang akan terjadi di masa depan apabila suatu alternatif dipilih (Allison, 1971, p. 30). Setiap tindakan alternatif yang diberlakukan kedepannya akan menyebabkan berbagai konsekuensi. Adapun konsekuensi relevan yang muncul tadi merupakan manfaat (*benefits*) dan biaya (*costs*) dari alternatif yang dipilih pada hal strategis di dalam tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) (Allison, 1971, p. 33).

d) *Choice*

Pilihan dalam model ini merupakan pilihan yang paling rasional dari semua alternatif yang ada yang konsekuensinya paling menguntungkan dalam hal manfaat dan tidak banyak merugikan dalam hal biaya (Allison, 1971, p. 30). Maka dari itu seorang aktor harus memaksimalkan segala nilai yang ada dan mengambil pilihan alternatif dengan konsekuensi terbaik bagi negaranya (Allison, 1971, p. 33).

III. Pola Inferensi Dominan

Jika suatu negara terlibat dalam suatu tindakan tertentu, maka negara tersebut harus mempunyai tujuan atau sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh tindakan tersebut seefektif mungkin. Kekuatan penjelas Model Aktor Rasional berasal dari kemampuannya membuat kesimpulan berdasarkan pola. Teka-teki ini dipecahkan dengan mengidentifikasi pola yang disengaja di mana peristiwa tersebut mungkin ditempatkan sebagai strategi untuk memaksimalkan nilai.(Allison, 1971, p. 33).

Tabel 1. 1 Kalkulasi Untung Rugi

<i>Alternatives</i>	<i>Benefits</i>	<i>Costs</i>
Menyepakati gencatan senjata dengan Houthi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tekanan internasional 2. Meminimalisir kerugian ekonomi Arab Saudi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya kelompok Houthi di Yaman
Melanjutkan perang dengan kelompok Houthi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah perkembangan Houthi di Yaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat tekanan internasional 2. Mengancam aset ekonomi milik Arab Saudi

Berdasarkan model ini, aktor rasional mampu menjabarkan alasan mengapa Arab Saudi menyepakati gencatan senjata dengan Houthi di Yaman pada 2022. Dengan digunakannya model ini, penulis mampu mengamati bahwa Arab Saudi bersifat rasional di mana Saudi harus memilih alternatif mana yang paling menguntungkan baginya yang paling banyak membawa keuntungan daripada kerugian terhadap negara mereka. Maka Arab Saudi sebagai aktor rasional diharuskan untuk menetapkan kebijakan negara mereka saat menghadapi situasi yang berada di hadapannya sesuai dengan kepentingan nasional negara itu sendiri. Kemudian, Saudi harus membuat pilihan terhadap situasi yang dihadapinya serta

mempertimbangkan seluruh keuntungan maupun kerugian apabila mereka memilih alternatif apa yang ada ketika mereka bersedia untuk menyepakati gencatan senjata dengan Houthi pada tahun 2022 atau malah melanjutkan untuk berperang dengan kelompok Houthi dalam perang saudara di Yaman.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah serta pemilihan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah ditulis di atas ditemukan hipotesis bahwa Arab Saudi berupaya menciptakan perdamaian pada perang saudara di Yaman melalui gencatan senjata dengan kelompok Houthi di tahun 2022 karena:

- 1) Arab Saudi ingin memperbaiki *image* atau nama baik (citra) negaranya
- 2) Arab Saudi berusaha meminimalisir kerugian ekonomi negaranya

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis mencermati bahwa data kualitatif dapat diulas dalam berbagai format. Metode kualitatif dapat diinterpretasikan sebagai langkah penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati. Penulis menggunakan metode kualitatif agar mampu mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antara dua belah pihak, yaitu Arab Saudi dan Kelompok Houthi, dengan berpatokan pada rujukan data-data ilmiah atau data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, dimana data-data tersebut disortir dan diolah dengan cermat menggunakan teknik analisis data. Data sekunder yang penulis peroleh bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal lokal maupun internasional, laporan kerja, tesis, artikel dan berita online. Dengan sumber data sekunder tersebut diharapkan mampu mengakomodasi penulis untuk memaparkan lebih dalam mengenai kesepakatan gencatan senjata oleh Arab Saudi dan Houthi atas perang saudara di Yaman.

1.6 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian atau ruang lingkup dalam penelitian ini diperlukan bagi penulis untuk membatasi analisis. Oleh Karena itu, penulis akan membuat batasan dalam skripsi ini mengenai ruang lingkup waktu dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Namun, ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk menganalisis Arab Saudi sebagai sebuah negara melakukan perubahan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional terhadap negara yang bersangkutan atas konflik perang saudara di Yaman hingga tahun 2022 saja. Penelitian ini juga akan berfokus pada alasan utama mengapa Arab Saudi mau menyepakati kesepakatan gencatan senjata pada perang saudara di Yaman dengan kelompok Houthi di tahun 2022.

1.7 Sistematika Penelitian

Struktur dari skripsi ini untuk menganalisis rasionalitas Arab Saudi dalam menyepakati gencatan senjata dengan kelompok pemberontak Houthi pada perang saudara di Yaman tahun 2022 disusun sebagai berikut:

Bab I: Bab ini memperkenalkan keseluruhan penelitian yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesis, Metode Penelitian dan Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II: Bab ini menjelaskan intervensi Arab Saudi pada perang saudara di Yaman serta memaparkan upaya yang telah dilakukan Arab Saudi untuk menghentikan perang saudara di Yaman.

Bab III: Bab ini menjelaskan alasan rasional mengapa Arab Saudi mau menyepakati gencatan senjata pada perang saudara di Yaman melalui gencatan senjata dengan kelompok Houthi di tahun 2022 sesuai dengan cara berpikir aktor rasional pada situasi perang saudara di Yaman.

Bab IV: Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian.